

## PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGORGANISASIAN BAHAN PERPUSTAKAAN BERBASIS SKKNI BIDANG PERPUSTAKAAN 2019

Oleh: Suharyanto

Pustakawan Bidang Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Perpustakaan 2019 merupakan aturan baku yang digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga perpustakaan. Dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepustakawanan. Tulisan ini membahas tentang pengembangan kurikulum pengorganisasian bahan perpustakaan berdasarkan SKKNI Bidang Perpustakaan 2019. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan diskusi kelompok. Hasil kajian menunjukkan bahwa SKKNI bidang Perpustakaan 2019 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum diklat pengorganisasian bahan perpustakaan. Materi inti diklat pengorganisasian bahan perpustakaan berdasarkan standar SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 terdiri dari 7 materi, yaitu; (1) Kebijakan pengorganisasian bahan perpustakaan, (2) Pengatalogan deskriptif (3) Pengatalogan subjek (4) Pengatalogan berbasis komputer (5) Pasca Pengatalogan (6) Literatur sekunder (7) Tajuk kendali.

Kata kunci: *Diklat, kompetensi, kurikulum, pengorganisasian bahan perpustakaan*

### 1. Pendahuluan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan (selanjutnya disebut SKKNI Bidang Perpustakaan 2019) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2019. SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, maka SKKNI ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan dan pelatihan perpustakaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional

Berdasarkan keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kurikulum, program, penyelenggaraan dan pengelolaan sarana serta evaluasi program Pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) salah satunya menyelenggarakan fungsi

pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

Tulisan ini akan membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan “Pengorganisasian Bahan Perpustakaan” yang didasarkan pada SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 dengan fungsi kunci “Pengorganisasian Bahan Perpustakaan. Fungsi kunci dijabarkan menjadi 7 fungsi utama dan dijadikan sebagai materi pokok dalam penyusunan kurikulum. Yaitu sebagai berikut: (1) Kebijakan pengorganisasian bahan perpustakaan, (2) Pengatalogan deskriptif (3) Pengatalogan subjek (4) Pengatalogan berbasis komputer (5) Pasca Pengatalogan (6) Literatur sekunder (7) Tajuk kendali.

## **2. SKKNI Bidang Perpustakaan**

### **2.1 Pengertian dan Perkembangan**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sertasi sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan merupakan acuan baku yang digunakan untuk menilai kompetensi tenaga perpustakaan.

SKKNI Bidang Perpustakaan dirumuskan pertama kali pada tahun 2012 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan. Selanjutnya SKKNI Bidang

Perpustakaan 2012 dikembangkan menjadi SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan. Dengan ditetapkannya SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 maka SKKNI Bidang Perpustakaan 2012 tidak digunakan lagi sebagai acuan baku untuk menilai kompetensi tenaga perpustakaan.

### **2.2 Pemetaan SKKNI Bidang Perpustakaan 2019**

Pemetaan SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 terdiri dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar. Tujuan utamanya adalah “Mengelola perpustakaan secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka”. Sedangkan fungsi kunci terdiri atas 7 bagian, yaitu; (1) Pengembangan koleksi perpustakaan terdiri dari 3 fungsi utama dan 8 fungsi dasar, (2) Pengorganisasian Bahan Perpustakaan, terdiri dari 7 fungsi utama dan 22 fungsi dasar (3) Layanan Perpustakaan, terdiri dari 5 fungsi utama dan 28 fungsi dasar (4) Pestaarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari 4 fungsi utama dan 22 fungsi dasar (5) Pengembangan Profesi dan Sistem Kepustakawanan, terdiri dari 3 fungsi utama dan 17 fungsi dasar (6) Manajemen Perpustakaan, terdiri dari 3 fungsi utama dan 11 fungsi dasar, (7) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari 3 fungsi utama dan 44 fungsi dasar.

Pemetaan secara keseluruhan dalam SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 terdiri dari; 7 fungsi kunci, 28 fungsi utama, 152 fungsi dasar

### 2.3 Fungsi Dasar dan Unit Kompetensi Pengorganisasian Bahan Perpustakaan

Di dalam SKKNI Bidang Perpustakaan 2019, fungsi kunci Pengorganisasian Bahan Perpustakaan, terdiri dari 7 fungsi utama dan 22 fungsi dasar. 7 fungsi utama terdiri dari: (1) Menyusun kebijakan pengorganisasian bahan perpustakaan, (2) Melaksanakan pengatalogan deskriptif, (3) Melaksanakan pengatalogan subjek, (4) Melaksanakan Pengatalogan

berbasis komputer, (5) Melaksanakan pascapengatalogan, (6) Membuat literatur sekunder sebagai sarana temu kembali informasi, dan (7) Membuat tajuk kendali. Sedangkan 22 fungsi dasar dituangkan dalam daftar unit kompetensi “Pengorganisasian Bahan Perpustakaan. (Tabel 1)

**Tabel 1**  
**Daftar Unit Kompetensi Pengorganisasian Bahan Perpustakaan**

Pengorganisasian Bahan Perpustakaan		
No.	Kode unit	Judul unit kompetensi
9.	R.91PRP02.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan
10.	R.91PRP02.002.1	Mengevaluasi Kebijakan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan
11.	R.91PRP02.003.1	Membuat Deskripsi Bibliografis Bahan Perpustakaan
12.	R.91PRP02.004.1	Menentukan Titik Akses Kepengarangan
13.	R.91PRP02.005.1	Melakukan Analisis Subjek
14.	R.91PRP02.006.1	Menentukan Notasi Subjek
15.	R.91PRP02.007.1	Mengelola Struktur Metadata
16.	R.91PRP02.008.1	Melakukan <i>Copy Cataloging</i> Berbasis Komputer
17.	R.91PRP02.009.1	Melakukan Validasi Data Bibliografi
18.	R.91PRP02.010.1	Membuat Identitas Bahan Perpustakaan
19.	R.91PRP02.011.1	Melakukan Penjajaran Kartu Katalog
20.	R.91PRP02.012.1	Membuat Anotasi Koleksi Perpustakaan
21.	R.91PRP02.013.1	Membuat Abstrak Koleksi Perpustakaan
22.	R.91PRP02.014.1	Membuat Indeks
23.	R.91PRP02.015.1	Menyusun Bibliografi
24.	R.91PRP02.016.1	Membuat Panduan Pustaka ( <i>Pathfinder</i> )
25.	R.91PRP02.017.1	Menyusun Direktori

(Sumber: SKKNI Bidang Perpustakaan 2019)

-  
-

### 3. Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pengorganisasian Bahan Perpustakaan

#### 3.1. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan (LAN 2018). Kurikulum sangatlah penting dalam kegiatan diklat. Menurut (Zainal 2011) fungsi kurikulum merupakan alat untuk tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan Pendidikan yang ada di bawahnya.

Pada saat ini penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan dan pelatihan perpustakaan berbasis kompetensi dapat merujuk pada SKKNI Bidang Perpustakaan 2019. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya (LAN 2018) Menurut (Widi 2018) kurikulum berbasis

kompetensi menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi peserta diklat agar bisa mengantisipasi aneka tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupannya. Jika sebelumnya pembelajaran dalam diklat lebih ditekankan pada aspek pengetahuan dan target materi yang cenderung verbalis dan kurang memiliki daya terap, saat ini lebih ditekankan pada aspek kompetensi dan target keterampilan. Pengembangan kurikulum diklat pengorganisasian bahan perpustakaan berdasarkan SKKNI bidang perpustakaan 2019 dapat dikembangkan sebagai berikut: (1) Fungsi kunci “Pengorganisasian Bahan Perpustakaan” dapat dijadikan sebagai nama diklat “Pengorganisasian Bahan Perpustakaan; (2) 7 Fungsi utama Pengorganisasian Bahan perpustakaan dijadikan nama materi sajian diklat; (3) 22 Fungsi dasar pengorganisasian Bahan perpustakaan dapat dijadikan sebagai sub materi sajian diklat. Rancangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Pengembangan Kurikulum Diklat Pengorganisasian Bahan Perpustakaan Berbasis SKKNI 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum diklat kepustakawanan dan didasarkan pada SKKNI Bidang Perpustakaan 2019. Hal yang penting dari tujuan diklat merubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta diklat dalam melakukan pengorganisasian bahan perpustakaan.

### 3.2. Rancangan Kurikulum Diklat Pengorganisasian Bahan Perpustakaan

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang diselenggarakan oleh Tim Pusdiklat dan Tim

Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI. Rancangan pengembangan kurikulum diklat pengorganisasian bahan perpustakaan mengacu kepada SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 khususnya pada fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar Pengorganisasian bahan perpustakaan maka dapat dirancang kurikulum diklat pengorganisasian sebagai berikut (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2**

Rincian mata Diklat Pengorganisasian Bahan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Materi Sajian	JP Teori	JP Praktik
A.	<b>Kelompok Dasar</b>		
	Peraturan Perundang–Undangan dan Peraturan Terkait Pengorganisasian Bahan Perpustakaan	2	-
	Pengantar Pengorganisasian Bahan Perpustakaan	2	-
B.	<b>Kelompok Inti</b>		
	Kebijakan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan	4	-
	Pengatalogan Deskriptif	10	10
	Pengatalogan Subjek	12	12
	Pengatalogan Berbasis Komputer	4	6
	Pascalogalogan	2	4
	Literatur Sekunder	6	4
	Tajuk kendali	4	6
C.	<b>Kelompok Penunjang</b>		
	Rencana Tindak Lanjut	2	
	Evaluasi	2	
	Observasi Lapangan	6	
	Dinamika Kelompok	2	
	<b>Total Jam Pelatihan</b>	<b>104</b>	<b>42</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa kurikulum dibagi menjadi 3 kelompok materi sajian, yaitu: (1) Kelompok dasar terdiri dari 2 materi, yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengantar Pengorganisasian Bahan Perpustakaan (2) Kelompok inti terdiri dari 7 materi, yaitu Kebijakan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan, Pengatalogan Deskriptif, Pengatalogan Subjek, Pengatalogan Berbasis Komputer, Pascapengatalogan, Literatur Sekunder, Tajuk kendali (3) Kelompok penunjang terdiri dari 4 materi yaitu: Rencana Tindak Lanjut, Evaluasi, dan Dinamika Kelompok. Secara keseluruhan terdapat 13 materi pembelajaran dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 146 jam/lat terbagi menjadi 104 jam/lat teori dan 42 jam/lat praktik.

#### 4. Penutup

Penyusunan kurikulum diklat kepastakawan berbasis kompetensi pada saat ini dapat mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan 2019. SKKNI diperlukan dan digunakan oleh lembaga-lembaga diklat untuk hal-hal sebagai berikut: (1) SKKNI digunakan oleh lembaga diklat untuk menyusun program-program diklat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, (2) SKKNI digunakan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan program diklat, (3) SKKNI digunakan untuk menyusun materi atau modul yang sesuai dengan program diklat, (4) SKKNI digunakan untuk evaluasi/penilaian penyelenggaraan diklat dan sertifikasi kompetensi peserta diklat. Rancangan kurikulum diklat pengorganisasian bahan perpustakaan berbasis SKKNI Bidang Perpustakaan 2019 terdiri dari atas 3 kelompok, yakni

kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Secara keseluruhan terdapat 13 materi pembelajaran dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 146 jam/lat terbagi menjadi 104 jam/lat teori dan 42 jam/lat praktik.

#### Daftar Pustaka

- Bahan Diskusi Rancangan Kurikulum Pengorganisasian Bahan Perpustakaan (2019). Tim Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpusnas bersama Tim Pengolahan Bahan Pustaka.
- Brosur dan profil Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional. (2018) Jakarta: Pusdiklat, Perpusnas
- Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2019). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan
- Lembaga Administrasi Negara (2018). *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri sipil*
- Widi Asih Nurhayati dan Bachtiar Sjaiful Bachri. (2018). Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam membangun profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017 Halaman: 156-164 DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jp.v2n2.p156-164>
- Zaaenal Arifin (2011). *Konsep dan model pengembangan kurikulum*. Bandung: Rosdakarya. Akses Ipusnas 21-12-2019.